BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dipahami sebagai sebuah peristiwa hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung makna yang mendalam dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan sosial dan hukum yang membawa konsekuensi yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar memiliki kekuatan hukum, perkawinan tersebut harus dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut.¹

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sarat keberkahan. Syariat Islam menetapkannya sebagai bentuk perlindungan dan kebaikan bagi umat manusia, dengan tujuan untuk mewujudkan berbagai nilai luhur dalam kehidupan. Di antara tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi, serta menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang diharamkan.² Tujuan pernikahan tidak semata-mata terbatas

¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 3

pada aspek biologis sebagai sarana yang sah untuk menjalin hubungan seksual antara pasangan suami istri, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas. Pernikahan merupakan fondasi bagi kehidupan rumah tangga yang melibatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta kerja sama dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.³

Pernikahan dapat ditinjau dari dua sudut pandang utama. Pertama, sebagai pelaksanaan ajaran agama yang mengatur kehidupan manusia secara spiritual. Kedua, sebagai satu-satunya mekanisme yang sah secara syar‘i untuk menyalurkan kebutuhan biologis, khususnya dorongan seksual. Dalam perspektif ini, pernikahan tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap perintah agama, tetapi juga merupakan wujud pemenuhan fitrah manusia melalui cara yang sah, terhormat, dan dilandasi oleh nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial.⁴

Imam al-Ghazali memaparkan bahwa pernikahan memiliki lima tujuan utama yang mendalam. Pertama, untuk melahirkan keturunan dan memastikan keberlangsungan generasi manusia di muka bumi. Kedua, sebagai jalan yang sah dan terhormat untuk menyalurkan dorongan seksual sesuai dengan tuntunan syariat. Ketiga, sebagai upaya preventif dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat dan penyimpangan moral. Keempat, pernikahan melatih seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan rumah tangga serta memotivasi dalam mencari nafkah yang halal. Kelima, pernikahan menjadi

³Muhammad Daud Ali, 4

⁴Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998), 375

fondasi terbentuknya masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Perkawinan antara dua individu yang berlainan jenis kelamin, atau yang dikenal sebagai perkawinan heteroseksual, merupakan bentuk perkawinan yang secara umum diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Bentuk ini melibatkan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun demikian, dalam dinamika sosial kontemporer, juga muncul fenomena perkawinan sesama jenis—yakni pernikahan antara dua individu yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.⁶

Isu mengenai pernikahan sesama jenis telah menjadi perbincangan yang hangat dan memicu beragam respons dari berbagai kalangan. Perhatian terhadap topik ini semakin meningkat sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan yang melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh wilayah negaranya, yang terdiri dari 50 negara bagian. Sebelumnya, kebijakan ini hanya diberlakukan di 36 negara bagian, sementara 14 negara bagian lainnya masih melarang praktik tersebut.⁷ Sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, sejumlah figur publik di Indonesia yang dikenal sebagai aktivis dalam isu ini menyatakan dukungan mereka secara

⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, cet. VI, (t.tp.: asy-Syu'ub, t.t.), 688-703.

⁶Fauziah dkk., *Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, Jurnal Surya Kencana satu; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11 no. 2 (2020): 152.

⁷Citra Dyah Prastuti, *Mahkamah Agung Amerika Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*, https://kbr.id/berita/nasional/mahkamah_agung_amerika_legalkan_pernikahan_sesama_jenis, diakses pada tanggal 26 September 2024

terbuka dan menyambut keputusan tersebut dengan antusias. Respons positif yang mereka tunjukkan mencerminkan seolah-olah mereka telah lama menantikan pengesahan regulasi semacam itu.

Belanda mencatat tonggak sejarah penting pada tahun 2001 sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi melegalkan perkawinan sesama jenis. Salah satu figur bersejarah dalam konteks ini adalah Perdana Menteri Islandia, Johanna Sigurdardottir, yang secara resmi menikah dengan pasangannya, Jonina Leosdottir—yang juga seorang perempuan. Melalui pernikahan tersebut, Sigurdardottir tercatat sebagai kepala negara pertama di dunia yang melangsungkan pernikahan sesama jenis. Di sisi lain, pada tahun 2011, ribuan anggota komunitas gay menggelar demonstrasi besar di New York, Amerika Serikat, sebagai bentuk perayaan atas disahkannya undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis oleh senat negara bagian tersebut.⁸

Perkawinan sesama jenis, atau yang juga dikenal sebagai perkawinan homoseksual, merupakan bentuk pernikahan yang dijalani oleh individu-individu yang termasuk dalam komunitas LGBT. Di Indonesia, fenomena LGBT menunjukkan perkembangan yang nyata dalam kehidupan sosial, di mana sebagian kelompok dalam komunitas ini mulai menyuarakan permintaan agar keberadaan dan hak-hak mereka diakui secara legal. Salah satu organisasi yang mewadahi perjuangan tersebut adalah “Arus Pelangi”, sebuah federasi yang mewakili komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di

⁸*Rayakan UU Pernikahan Sejenis, Ribuan Gay Gelar Parade di New York*, <http://news.detik.com/read/2011/06/27/023534/1669025/1148/>, diakses pada tanggal 26 September 2024

Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan pengakuan hak-hak mereka, termasuk dalam hal penyaluran identitas dan orientasi seksual, yang oleh sebagian masyarakat masih dianggap menyimpang dari norma mayoritas.⁹ Fenomena perkawinan sesama jenis di Indonesia telah beberapa kali mencuat ke ruang publik dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satu peristiwa awal yang menarik perhatian terjadi pada tahun 1981, ketika pasangan lesbian, Josi dan Bonie, melangsungkan pernikahan secara simbolis di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Juli 1981. Selanjutnya, pada tahun 2008, pernikahan sesama jenis kembali terjadi di Yogyakarta, kali ini melibatkan pasangan gay bernama Wim dan Philip. Di tahun 2015, kasus serupa muncul dengan latar belakang lintas negara, yakni pernikahan antara Tiko Mulya, warga negara Indonesia, dan Joe Tully, warga negara asing, yang diselenggarakan di Bali dengan menggunakan upacara adat Hindu. Kemudian, pada Juli 2017, terjadi lagi pernikahan sesama jenis di Jember antara Fadholi (21) dan Ayu Puji Astuti (23), yang secara administratif dilangsungkan secara resmi dan memiliki legalitas formal, meskipun keduanya sebenarnya berjenis kelamin laki-laki.¹⁰ Fenomena tersebut mencerminkan adanya tuntutan dari sebagian kalangan untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, atau yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Mereka beranggapan bahwa hak-hak sipil, termasuk dalam hal pernikahan, seharusnya dapat diakses tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual.

⁹Lebih detail tentang perkumpulan/organisasi ini lihat website www.aruspelangi.or.id dan <http://lgbtindonesia.org/main/>, akses 26 September 2024

¹⁰R Rohmawati, A Chakim, dan L Rofiqoh, *Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Istibanth, 17 (2018): 89.

Selain dukungan dari dalam negeri, beberapa organisasi internasional juga turut memberikan dukungan terhadap gerakan yang mendorong pengesahan perkawinan sesama jenis di Indonesia. Di antaranya adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan United States Agency for International Development (USAID), yang diduga memberikan dukungan, termasuk dalam bentuk pendanaan, terhadap kampanye advokasi hak-hak LGBT di tanah air.¹¹

Dukungan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis juga muncul dari kalangan cendekiawan Muslim, yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk wacana pemikiran Islam kontemporer. Pandangan mereka banyak tersebar melalui berbagai medium, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta forum diskusi di media sosial, termasuk platform seperti YouTube. Salah satu tokoh yang dikenal vokal dalam isu ini adalah Irshad Manji, yang sering mengangkat tema kebebasan, keberagaman, dan interpretasi ulang terhadap ajaran agama dalam konteks hak-hak individu.

Irshad Manji mungkin belum begitu dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, ia pernah dua kali berkunjung ke Indonesia, yakni pada tahun 2008 dan 2012, dalam rangka mempromosikan bukunya *The Trouble with Islam Today: A Wake-Up Call for Honesty and Change*, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini*. Lahir di Uganda pada tahun 1968, Manji dikenal sebagai sosok yang kontroversial karena pemikirannya yang liberal dan keterbukaannya

¹¹ Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, Ahkam, 4, No. 2. (2016): 309.

dalam mengkritisi ajaran Islam dari sudut pandang yang tidak konvensional. Ia aktif menulis buku-buku yang mengangkat tema keimanan, kebebasan berpikir, dan nilai-nilai cinta. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan penolakan terhadap pemikirannya terjadi pada tahun 2012, ketika diskusi peluncuran bukunya di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan, dibubarkan oleh sekelompok massa yang menolak kehadiran dan gagasan-gagasannya.¹²

Irshad Manji merupakan seorang penulis, jurnalis, dan intelektual publik asal Kanada yang dikenal sebagai advokat reformasi pemikiran Islam dengan pendekatan yang progresif. Ia secara terbuka mendukung hubungan sesama jenis dan dikenal sebagai bagian dari komunitas LGBT. Pada Mei 2016, Irshad Manji menikah dengan pasangannya, Laura Albano. Informasi mengenai pernikahannya tersebut dibagikan secara publik melalui akun Facebook pribadinya, di mana ia menyampaikan rasa syukur atas ucapan selamat dan doa dari para pengikutnya, seraya menginformasikan bahwa dokumentasi foto pernikahan mereka akan dibagikan menyusul.¹³ Pengakuan Manji sebagai seorang lesbian juga diungkapkan secara eksplisit dalam bukunya *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*.

*"I'm openly lesbian, I choose to be "out"...I met my first girlfriend in my twenties and weeks afterwards, I told my mother about the relationship. She responded like the wonderful parent she is. So the question of whether I could be a Muslim and a lesbian at the same time barely unsettled me. That was religion. This was happiness. I knew which one I needed more."*¹⁴

¹² Tony Febryanto, <https://www.brilio.net/serius/irshad-manji-tokoh-muslim-kontroversial-jalani-pernikahan-sejenis-1605109.html>, diakses 2 Februari 2025

¹³ Tony Febryanto, <https://www.brilio.net/serius/irshad-manji-tokoh-muslim-kontroversial-jalani-pernikahan-sejenis-1605109.html>.

¹⁴ Irshad Manji, *The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faith* (Macmillan, 2007), 23–24

" Secara terbuka, kunyatakan diriku sebagai seorang lesbian. Aku memilih untuk 'mengakuinya kepada dunia luar'... Aku bertemu kekasih pertamaku di usia ku yang ke dua puluhan. Beberapa minggu kemudian, aku menceritakan hubunganku kepada ibu. Dia merespons dengan bijak layaknya orang tua yang biasanya. Sehingga pertanyaannya, apakah aku bisa menjadi seorang muslim dan seorang lesbian pada saat yang bersamaan, tidaklah menggangguku sama sekali. Yang itu adalah agama. Yang ini adalah kebahagiaan. Aku tahu mana yang lebih kubutuhkan

Irshad pun mengaku bersikap kritis dan curiga terhadap terhadap ayat yang dijadikan dalam mengharamkan homoseksual, Menurut Irshad Manji, kisah kaum Nabi Lut dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengecam homoseksualitas sebagai orientasi seksual, melainkan menyoroti penyimpangan perilaku seksual yang digunakan sebagai sarana kekuasaan dan penindasan. Ia menafsirkan bahwa tindakan kaum Lut bukan dilandasi oleh ketertarikan sesama jenis, melainkan merupakan bentuk kekerasan seksual—yakni pemerkosaan antar laki-laki—yang dilakukan untuk menunjukkan dominasi dan mengendalikan orang lain, termasuk mereka yang heteroseksual. Dalam pandangannya, perbuatan tersebut adalah “*sin of choice*” atau dosa yang dilakukan secara sadar dan disengaja, bukan akibat dari kecenderungan alamiah, melainkan sebagai alat untuk mempermalukan, menakut-nakuti, dan menunjukkan superioritas, khususnya terhadap tamu atau pendatang.

Lebih jauh, Manji menyoroti bahwa Al-Qur'an juga menggambarkan kaum Lut sebagai pelaku kejahatan sosial dan ekonomi, seperti merampas kekayaan, memutus akses perdagangan, dan berlaku tidak ramah terhadap orang asing. Oleh karena itu, menurutnya, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka

lebih tepat dipahami sebagai akibat dari kezaliman struktural dan kekerasan sosial, bukan semata karena orientasi seksual mereka.

“The Sodom and Gomorrah story—Islam’s parable of Lut—is ambiguous. You’re certain it’s about homosexuals, but it could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control. God punished Lut’s tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders. Male-on-male rape might have been the sin of choice to instill fear in travelers.”¹⁵

Kisah Sodom dan Gomorah—kisah Islam tentang Nabi Luth—tergolong ambigu. Kamu merasa yakin kalau surah ini mengenai homoseksual, tetapi bisa saja surah ini mengangkat perkosaan lelaki “straight” (heteroseksual) oleh lelaki “straight” lainnya sebagai gambaran kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar (sebagai bentuk “perkosaan” itu). Perkosaan male-on-male tersebut bisa jadi merupakan dosa yang disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara.

Menurut Irshad Manji, Islam memiliki warisan intelektual berupa tradisi *ijtihad* yang dahulu pernah menjadi sumber kekayaan pemikiran dalam peradaban Islam. *Ijtihad* dipahami sebagai ruang untuk perbedaan pendapat, pertukaran argumentasi, dan interpretasi terhadap ajaran agama. Bagi Manji, tradisi ini mencerminkan kebebasan berpikir yang seharusnya menjadi bagian dari identitas seorang Muslim. Namun, ia menilai bahwa semangat *ijtihad* kini mulai pudar dalam kehidupan umat Islam modern, sehingga kebebasan individu dalam menafsirkan ajaran agama pun turut terpinggirkan.¹⁶ Padahal, Al-Qur’an sendiri mengandung lebih banyak seruan kepada umat Islam untuk

¹⁵ Irshad Manji, *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom*. (Free Press, 2012), 200.

¹⁶ Irshad Manji, *The Trouble with Islam: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith* (Macmillan, 2007), 3.

menggunakan akal dan berpikir kritis dibandingkan dengan perintah untuk menerima ajaran secara pasif atau melakukan taklid secara membabi buta. Dalam pandangan ini, seorang Muslim seharusnya memiliki keberanian untuk berpikir secara mandiri dan mendalam. Keberanian intelektual semacam itu diyakini mampu menghadirkan harmoni antara nilai-nilai ketuhanan, kebebasan individu, dan cinta sebagai landasan dalam menjalani kehidupan beragama yang bermakna dan bertanggung jawab.¹⁷

Pandangan Irshad Manji mengenai pernikahan sesama jenis telah memicu respons yang signifikan dari berbagai pihak, termasuk kalangan ulama, intelektual Muslim, maupun masyarakat yang berpandangan keagamaan konservatif. Gagasan-gagasannya menuai reaksi yang beragam—ada yang mendukung secara terbuka, namun tidak sedikit pula yang menolak dengan tegas. Mengingat besarnya pengaruh pemikiran Manji terhadap dinamika perubahan sosial dan cara pandang terhadap ajaran agama, maka diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menelaah dan mengevaluasi pandangannya, khususnya dalam kerangka hukum Islam.

Sejalan dengan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian perihal ” TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG PERKAWINAN SEJENIS”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi pandangan Irshad Manji terkait pernikahan sesama jenis, serta

¹⁷ Irshad Manji, *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom.*, xxiii.

menganalisisnya melalui pendekatan epistemologi hukum Islam dan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Dengan pendekatan yang bersifat kritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana agama, khususnya Islam, berperan dalam membentuk kesadaran sosial dan moral umat terhadap isu-isu kontemporer seperti orientasi seksual dan pernikahan non-konvensional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pemikiran Irshad Manji terkait perkawinan sejenis?
3. Bagaimana pandangan Epistemologi Hukum Islam dan *Maqâsid al-Syarî'ah* terhadap pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemikiran Irshad Manji terkait isu perkawinan sejenis.
3. Mengkaji pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis dari perspektif Epistemologi Hukum Islam dan *Maqâsid al-Syarî'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berupaya menguraikan hasil pembahasan dan analisis secara mendalam mengenai latar belakang, substansi pemikiran, paradigma, serta tawaran gagasan dari Irshad Manji terkait isu perkawinan sejenis, dalam kerangka epistemologi hukum Islam dan *Maqâsid al-Syarî'ah*. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan implikasi pada tataran teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam menelaah pemikiran-pemikiran liberal yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.
- b. Memperluas wawasan keilmuan terkait penerapan pendekatan epistemologi hukum Islam dan *maqâsid al-syarî'ah* dalam merespons dan mengkaji wacana pemikiran modern, khususnya yang berkaitan dengan isu pernikahan sesama jenis.
- c. Menjadi landasan awal bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kritik terhadap pemikiran-pemikiran kontemporer dalam isu-isu hukum keluarga dalam perspektif Islam.
- d. Memperkaya referensi kepustakaan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam kajian pemikiran tokoh-tokoh kontemporer serta respons Islam terhadap pandangan-pandangan yang mereka kemukakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi rujukan akademis dan edukatif dalam merespons pemikiran-pemikiran yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep dan praktik perkawinan.
- b. Memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum Islam mengenai pentingnya menjaga integritas dan otoritas keilmuan Islam dalam merespons tantangan pemikiran kontemporer yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.
- c. Menumbuhkan sikap kritis terhadap wacana-wacana yang berpotensi merusak tatanan hukum dan sosial masyarakat Muslim, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dan keadilan menurut Islam.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, berikut adalah definisi operasional dari sejumlah istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Telaah Kritis

Telaah kritis merupakan sebuah proses pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap suatu teks, artikel, atau buku, yang dilakukan secara menyeluruh oleh seorang penelaah. Proses ini mencakup pembacaan secara utuh, identifikasi gagasan utama, pengumpulan data atau argumen pendukung, serta penyusunan tanggapan atau komentar yang reflektif berdasarkan sudut pandang dan kepentingan akademis penelaah. Dalam

praktiknya, telaah kritis tidak hanya berfokus pada isi, tetapi juga pada bagaimana teks tersebut dipahami secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: kejelasan (*clarity*), kualitas isi (*quality*), dan keaslian gagasan (*originality*). Ketiga aspek ini menjadi tolok ukur dalam menilai nilai ilmiah serta relevansi dari teks yang dikaji.¹⁸

Dalam konteks penelitian ini, telaah kritis dimaknai sebagai proses analisis dan evaluasi mendalam terhadap suatu pemikiran atau pandangan, dengan mempertimbangkan kekuatan argumen, relevansi substansi, serta kesesuaiannya dengan landasan teoritis dan norma yang dijadikan acuan. Telaah ini tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan isi pemikiran tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menguji tingkat validitas dan konsistensinya melalui pendekatan epistemologi hukum Islam dan prinsip-prinsip *maqâsid al-syari'ah*.

2. Pemikiran Irshad Manji

Pemikiran dapat dipahami sebagai hasil internalisasi nilai, ide, atau gagasan yang diterima oleh seseorang dari lingkungan sosialnya, yang kemudian dijadikan pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertindak.¹⁹ Irshad Manji merupakan Direktur dari *Moral Courage Project* di Universitas New York, sebuah inisiatif yang berfokus pada keberanian moral dalam menghadapi ketidakadilan dan intoleransi. Ia juga dikenal sebagai penulis buku *The Trouble with Islam Today: A Muslim's Call for*

¹⁸ Maemuna Muhayyang dkk, "Workshop On The Writing Of Critical Review," *Universitas Negeri Makassar, Jurnal GEMBIRA*, 1 (2003): 10.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses 25 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/pemikiran>.

Reform in Her Faith, yang menjadi bestseller versi *The New York Times* dan telah diterbitkan di lebih dari 30 negara. Edisi terjemahan dalam bahasa Arab, Urdu, dan Persia yang tersedia melalui situs resminya bahkan telah diunduh lebih dari dua juta kali.²⁰

Dalam penelitian ini, pemikiran Irshad Manji merujuk pada seperangkat gagasan, pandangan, dan argumentasi yang ia sampaikan terkait legalitas serta upaya normalisasi pernikahan sesama jenis. Gagasan tersebut dihimpun dari berbagai karya tulisnya, wawancara, maupun pernyataan publik yang relevan. Seluruh pemikiran tersebut dianalisis dalam bingkai nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam sebagai kerangka evaluatif utama.

3. Perkawinan sejenis

Istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang secara linguistik mengandung arti membentuk ikatan keluarga antara dua individu berlainan jenis, serta mencakup makna hubungan seksual atau persetubuhan. Dalam istilah Arab, perkawinan dikenal dengan kata *an-nikāh*, yang secara etimologis berarti menyatukan atau menghimpun. Kata ini juga mengandung makna *al-wath'*, yang merujuk pada hubungan fisik antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan.²¹ Sayyid Sabiq memandang bahwa perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah*, yakni ketetapan ilahi yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

²⁰ Irshad Manji, *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom.*, 304.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Prenadamedia Group, 2003), 8.

Dengan demikian, perkawinan diposisikan sebagai suatu fitrah universal dalam struktur kehidupan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Perkawinan sejenis merupakan bentuk ikatan pernikahan yang dijalani oleh dua individu dengan jenis kelamin yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Istilah lain yang kerap digunakan untuk merujuk pada praktik ini adalah perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual. Fenomena ini umumnya dikaitkan dengan komunitas LGBT, yakni singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual. Komunitas ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang beragam. Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, fisik, dan/atau spiritual terhadap sesama perempuan. Gay adalah istilah untuk laki-laki yang memiliki ketertarikan serupa terhadap sesama laki-laki. Sementara itu, biseksual menggambarkan individu yang merasakan ketertarikan emosional dan fisik terhadap baik lawan jenis maupun sesama jenis. Adapun transgender atau transseksual adalah individu

²²Perpustakaan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Citra Umbara, 2007), 2.

yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya, dan dalam beberapa kasus, mereka memilih untuk menjalani prosedur medis guna menyesuaikan kondisi tubuh dengan identitas gender yang mereka rasakan.²³

Penggunaan istilah-istilah tersebut mencerminkan adanya keragaman identitas dan orientasi seksual di dalam masyarakat. Setiap istilah mewakili pengalaman dan ekspresi yang berbeda dalam memahami identitas diri dan relasi interpersonal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang merasakan ketertarikan, baik secara emosional maupun seksual, terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Definisi ini menegaskan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu bentuk orientasi seksual yang eksistensinya dikenal secara linguistik dan sosiologis dalam konteks masyarakat kontemporer.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, perkawinan sejenis dipahami sebagai bentuk pernikahan antara dua individu yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau mendukung praktik tersebut, melainkan menjadikannya sebagai objek kajian yang ditelaah secara kritis melalui pendekatan hukum Islam, guna

²³Yansyah dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, t.t., 133.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1989).

memahami bagaimana fenomena ini diposisikan dalam kerangka normatif syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Nur Triyono yang berjudul *Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)* mengkaji secara mendalam asal-usul (genealogi) dan kerangka epistemologis pemikiran Irshad Manji dalam melihat legalitas perkawinan sesama jenis. Kajian tersebut berfokus pada bagaimana pemikiran Irshad Manji terbentuk secara historis dan epistemologis, tanpa mengujinya secara normatif dalam kerangka hukum Islam. Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas isu perkawinan sejenis dan menjadikan Irshad Manji sebagai subjek utama kajian. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Jika tesis Nur Triyono menekankan aspek genealogi dan epistemologi pemikiran, maka penelitian penulis lebih berfokus pada telaah kritis terhadap pemikiran Irshad Manji, dengan menganalisis dan mengujinya menggunakan epistemologi hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.
2. Tesis oleh Nuriswati berjudul *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Tesis ini membahas bagaimana hukum Islam dan HAM memandang perilaku homoseksual, termasuk persamaan dan perbedaan keduanya dalam merespons isu tersebut. Fokus utamanya terletak pada analisis normatif terhadap homoseksualitas sebagai perilaku seksual,

bukan pada wacana pernikahan sejenis secara khusus. Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengangkat isu seksualitas, khususnya dalam kaitannya dengan homoseksualitas dan implikasi hukumnya. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Tesis Nuriswati menitikberatkan pada perbandingan antara pandangan hukum Islam dan HAM terhadap homoseksualitas secara umum. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji pemikiran Irshad Manji mengenai perkawinan sejenis, serta menganalisisnya secara kritis melalui pendekatan epistemologi hukum Islam dan maqāsid asy-syarī'ah. Tidak seperti penelitian pada tesis yang lebih bersifat deskriptif dan membandingkan dua sistem hukum, penelitian penulis secara khusus menghadirkan pendekatan kritis terhadap pemikiran seorang tokoh, yakni Irshad Manji. Gagasan-gagasannya mengenai perkawinan sejenis dianalisis dan diuji dalam kerangka epistemologi hukum Islam dan maqāsid asy-syarī'ah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fayza Ilhafa, Aulia Alya Khoirunisa, Joni Hendrawan, Soyo Soyo, dan Sulistya Evingrum berjudul *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999*. Artikel ini membahas konsep LGBT dalam pandangan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku LGBT, serta strategi penanganan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengangkat isu seputar seksualitas, khususnya LGBT, dan sama-

sama menjadikan hukum Islam sebagai salah satu landasan analisis. Namun, arah kajian dalam jurnal ini lebih bersifat deskriptif terhadap fenomena LGBT secara umum, termasuk aspek penyebab dan penanganannya, serta menekankan pada hubungan antara hukum Islam dan HAM dalam konteks tersebut. Berbeda dari itu, penelitian penulis secara lebih spesifik mengkaji pemikiran Irshad Manji mengenai perkawinan sejenis, dengan pendekatan telaah kritis yang tidak hanya menggambarkan pandangannya, tetapi juga mengujinya melalui kerangka epistemologi hukum Islam dan maqāṣid asy-ṣyarī‘ah. Fokus yang lebih mendalam terhadap pemikiran tokoh dan pendekatan normatif-analitis inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang bersifat umum dan deskriptif.

4. Jurnal oleh Ghufroon dan Arifin yang berjudul “Penyimpangan Seksual: LGBT pada Keluarga Muslim, Faktor, dan Sikap Islam”. Jurnal ini membahas fenomena LGBT dalam konteks keluarga Muslim di Jakarta Selatan, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab munculnya orientasi seksual nonheteronormatif serta sikap Islam terhadapnya. Perspektif hukum Islam digunakan sebagai kerangka normatif utama dalam menganalisis penyimpangan seksual ini. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas isu LGBT yang berkaitan erat dengan seksualitas dan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis. Perbedaannya, jurnal ini lebih menitikberatkan pada penyebab sosial dan respons umum Islam terhadap LGBT, sementara penelitian penulis fokus pada pemikiran Irshad Manji tentang legalitas perkawinan sejenis serta

mengkajinya dalam kerangka epistemologi hukum Islam dan maqāṣid asy-syarī‘ah—suatu pendekatan konseptual yang belum dikaji dalam jurnal ini.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap berjudul *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah* membahas fenomena LGBT di Indonesia melalui pendekatan multidisipliner, yakni hukum Islam, hak asasi manusia, dan psikologi, dengan menekankan konsep maṣlahah sebagai pijakan penilaian normatif. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan isu, yaitu membahas LGBT dari sudut pandang hukum Islam. Namun, perbedaan utamanya adalah jurnal ini tidak membahas pemikiran tokoh tertentu, melainkan berfokus pada tinjauan tematik terhadap LGBT dalam konteks sosial dan hukum secara umum. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pemikiran Irshad Manji mengenai perkawinan sejenis, serta mengujinya secara kritis dalam kerangka epistemologi hukum Islam dan maqāṣid asy-syarī‘ah—pendekatan yang belum diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori

1. Grand Theory

a. Teori Rechtsstaat

Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang absah. Negara hukum bukan negara kerkuasaan (machtstaat). Negara hukum

sering disamakan dengan Rule of law. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal state", "state of law", "state of justice", or "state of rights" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.²⁵

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtsstaats dalam arti klasik, yaitu:²⁶

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*).
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

2. Middle Theory

a. Teori Hukum Keluarga

Secara umum, hukum keluarga dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam lingkup kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat bersumber dari dua hal, yaitu hubungan darah (nasab) dan hubungan yang dibentuk melalui

²⁵ Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir 2 no. 5 (2018): 57

²⁶ Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

perkawinan. Aspek ini memiliki peran penting karena berkaitan erat dengan berbagai persoalan seperti hubungan antara orang tua dan anak, pewarisan, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga mencakup keseluruhan norma dan ketentuan yang mengatur struktur serta dinamika relasi kekeluargaan. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk kekeluargaan: pertama, kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, yaitu hubungan antar individu yang memiliki nenek moyang atau leluhur yang sama; dan kedua, kekeluargaan yang terjalin karena adanya ikatan perkawinan, yakni hubungan antara seseorang dengan keluarga pasangan (suami atau istri) yang tidak memiliki pertalian darah langsung.²⁷

Sumber utama dalam hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan al-Hadits. Dari kedua sumber pokok ini, para ulama kemudian melakukan penggalian hukum yang menghasilkan berbagai bentuk produk hukum, seperti *fiqh*, *fatwa*, hingga peraturan perundang-undangan (*qānūn*) dalam konteks negara. Tidak dapat disangkal bahwa literatur *fiqh* klasik maupun kontemporer memuat pembahasan yang sangat luas dan mendalam mengenai aspek-aspek hukum keluarga Islam.²⁸

²⁷ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6 no. 2 (2014): 140

²⁸ Eko Setiawan, 140

3. Applied Theory

a. Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti kajian atau pembahasan. Dalam pengertian etimologis, epistemologi dipahami sebagai disiplin yang mengkaji tentang pengetahuan. Istilah ini kerap pula disebut sebagai teori pengetahuan, yaitu salah satu cabang filsafat yang secara mendalam menelaah hakikat pengetahuan, asal-usulnya, batas-batasnya, serta sejauh mana pengetahuan itu dapat dinilai sah atau valid.²⁹ Dalam ranah terminologi, epistemologi memiliki ragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Suwardi memandang epistemologi sebagai cabang filsafat yang menelaah asal-usul pengetahuan, mengurai asumsi-asumsi dasar yang melandasinya, serta mengeksplorasi karakteristik dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Senada dengan itu, L. O. Kattsoff menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari bagaimana pengetahuan terbentuk, struktur yang menyusunnya, cara ia diperoleh, hingga sejauh mana kebenaran atau validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Menurut Harold Titus dan koleganya, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berupaya menjawab tiga pertanyaan mendasar: pertama, dari mana asal atau sumber pengetahuan

²⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Gramedia Pustaka Utama, 1996), 212.

³⁰ Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, terj. Soejono Soemargono (Tiara Wacana, 1992), 76.

itu diperoleh; kedua, bagaimana proses atau cara manusia memperoleh pengetahuan tersebut; dan ketiga, apakah pengetahuan yang dimiliki itu dapat dianggap benar. Dalam hal ini, epistemologi juga membahas kriteria dan tolok ukur untuk membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang keliru.³¹

Merujuk pada berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa epistemologi memiliki sejumlah konsep kunci yang menjadi titik fokus kajiannya. Beberapa konsep utama tersebut antara lain: (1) asumsi-asumsi dasar yang mendasari ilmu pengetahuan, (2) sumber-sumber tempat pengetahuan berasal, (3) karakteristik atau sifat-sifat hakiki dari pengetahuan itu sendiri, (4) struktur atau susunan internal pengetahuan, (5) cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, serta (6) ukuran keabsahan atau validitas dari pengetahuan tersebut. Kata kunci pertama berkaitan dengan paradigma keilmuan, poin kedua dan ketiga membahas aspek sumber pengetahuan, poin keempat dan kelima terkait dengan metodologi atau proses perolehan ilmu, sementara poin keenam menyinggung tentang teori kebenaran dan landasan keabsahan suatu pengetahuan.

Hukum Islam, yang dalam tradisi keilmuan disebut sebagai fikih, merupakan cabang ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang bersifat praktis (*amaliyah*). Hukum-hukum ini diperoleh melalui proses *istinbāt*, yaitu penggalan secara sistematis dari dalil-dalil

³¹ Harold Titus dan dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat* (Bulan Bintang, 1984), 187–88.

syariat yang bersifat terperinci. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, yang bersumber langsung dari *nash-nash syar'i* yang spesifik dan dapat ditelusuri keabsahannya.³²

Epistemologi hukum Islam merupakan kajian teoritis mengenai pengetahuan hukum Islam yang membahas secara mendalam tentang asal-usul (sumber), metode, proses penemuan, pelaku, serta standar kebenaran suatu hukum. Dalam konteks ini, epistemologi hukum Islam mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pembahasan mengenai di mana hukum Islam ditemukan merujuk pada kajian tentang sumber-sumber hukum, yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas sebagai fondasi utama. Kedua, perhatian diarahkan pada bagaimana cara hukum tersebut diperoleh, yakni melalui metode *istinbāt*—sebuah proses sistematis dalam menggali dan merumuskan hukum dari dalil-dalil *syar'i* yang telah ditetapkan. Ketiga, mengkaji aktivitas penemuan hukum dan siapa yang berhak melakukannya, yang membawa pada diskusi tentang konsep *ijtihād* dan kualifikasi seorang *mujtahid*. Keempat, membahas tentang ukuran kebenaran atau validitas hukum Islam, yaitu bagaimana menilai hasil ijtihad tersebut sebagai sesuatu yang sah dan dapat diterima secara *syar'i*. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam tidak hanya berfokus pada produk hukum, tetapi juga pada proses intelektual dan metodologis yang melandasinya.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo, 1972), 11.

b. *Maqâşid al-Syarî'ah*

Maqâşid al-syarî'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama dan hikmah yang bersifat esensial yang ingin diwujudkan oleh *Syâri'* (Pembuat Syariat) melalui setiap ketentuan hukum yang ditetapkannya. Dengan kata lain, *maqâşid* mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dibalik perumusan hukum Islam, demi menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan kata lain, *maqâşid* mencerminkan nilai-nilai inti yang menjadi orientasi akhir dari keseluruhan sistem hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia.³³ Dengan demikian, *maqâşid al-syarî'ah* dipahami sebagai tujuan utama sekaligus arah dari setiap hukum *syar'i*, yang semestinya menjadi fokus perhatian para mujtahid dalam proses penetapan hukum. Prinsip mendasar yang ditekankan dalam pendekatan *maqâşid* adalah pentingnya moderasi, yaitu bersikap seimbang dan tidak berlebih-lebihan dalam penerapannya. Hal ini karena kemaslahatan yang ingin dicapai melalui hukum Islam tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional atau nalar manusia saja, tetapi harus tetap berpijak pada landasan wahyu sebagai sumber otoritatif hukum Islam.³⁴

Istilah *maqâşid al-syarî'ah* terdiri dari dua unsur: *maqâşid*, yang berarti maksud atau tujuan, dan *al-syarî'ah*, yang secara etimologis merujuk pada “jalan menuju sumber air”—sebuah metafora yang

³³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 11

³⁴ Busyro, 13

melambangkan jalan hidup atau sumber utama kehidupan. Dalam konteks ini, *maqâsid al-syarî'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan hukum Islam. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni segala bentuk kebaikan dan kebermanfaatannya bagi umat manusia. Kemaslahatan tersebut hanya dapat terwujud secara menyeluruh apabila lima aspek pokok kehidupan manusia terlindungi, yaitu: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*māl*).³⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan analitis. Pendekatan normatif dalam konteks penelitian hukum memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang tersusun secara sistematis dan logis. Artinya, hukum dipahami bukan sekadar sebagai aturan yang tertulis, melainkan sebagai keseluruhan kaidah yang membentuk tatanan normatif yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum dari segi asas, prinsip, serta ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Yang dimaksud dengan sistem norma dalam konteks ini mencakup asas-asas hukum, aturan atau norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan

³⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44

pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran keagamaan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah hukum sebagai seperangkat ketentuan normatif yang mengatur perilaku dan memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup seluruh sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Sumber utama yang digunakan meliputi dua buku karya Irshad Manji, yaitu *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom* dan *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menelaah dan menganalisis persoalan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum, namun tidak tergolong sebagai dokumen resmi atau formal. Jenis bahan ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, makalah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas topik-topik terkait hukum, khususnya yang relevan dengan tema penelitian. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau

³⁶Djarot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran berdasarkan Konsep Hukum*, 1 ed. (PT RajaGrafindo Persada, 2019), 39.

putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memberikan pemahaman teoritis, memperkuat argumentasi, dan memperkaya analisis dalam kajian hukum.³⁷ Buku-buku dan jurnal penelitian yang terlampir di daftar pustaka merupakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber-sumber di luar bidang hukum yang digunakan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap isu yang dikaji, selama tetap memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Bahan ini berfungsi sebagai penunjang dalam menjelaskan konteks sosial, budaya, atau wacana umum yang melingkupi persoalan hukum yang diteliti. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain adalah literatur umum mengenai perkawinan sejenis, kamus, ensiklopedi, serta sumber-sumber dari media elektronik yang memuat informasi atau opini publik yang berkaitan dengan topik kajian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menghimpun, menelaah, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang berkaitan erat dengan tema penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri beragam teori, pandangan, serta hasil kajian sebelumnya yang relevan, baik dari sumber primer, sekunder, maupun tersier, guna

³⁷Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran berdasarkan Konsep Hukum*, 47.

memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dihimpun dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam konteks ini, penulis berupaya menyajikan data secara sistematis, lalu menginterpretasikannya dengan menjelaskan makna, hubungan, dan kecenderungan yang terkandung di dalamnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan persoalan secara jelas dan terstruktur, sekaligus menyoroti argumen-argumen utama yang mendasari temuan dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis oleh penulis guna memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai keseluruhan isi kajian. Oleh karena itu, disusunlah sistematika penulisan yang menjelaskan fokus permasalahan serta pokok-pokok pembahasan pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian awal tentang penelitian ini. Dalam bab ini dibahas beberapa hal penting, antara lain: latar belakang masalah; permasalahan yang mencakup identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah; tujuan dan signifikansi penelitian; manfaat penelitian; tinjauan terhadap studi-studi terdahulu; metode penelitian yang meliputi jenis

dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis data, dan teknik penulisan; serta sistematika penulisan karya ilmiah ini.

BAB II membahas tentang Deskripsi Umum Tokoh: Irshad Manji. Yang mencakup Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektual Irshad Manji: Mengulas latar belakang keluarga, pendidikan, serta pengalaman hidup Irshad Manji sebagai seorang Muslimah reformis dan aktivis asal Kanada. Pembahasan juga mencakup perkembangan pemikirannya yang terbentuk melalui proses belajar otodidak serta keterlibatannya dalam dunia media dan advokasi sosial; Pandangan dan Gagasan Reformis Irshad Manji: Mengkaji pemikiran Manji terkait isu-isu keagamaan, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi, termasuk penolakannya terhadap tafsir keagamaan yang konservatif; Sikap dan Argumentasi Irshad Manji terhadap Perkawinan Sesama Jenis: Menganalisis perjalanan identitas seksual Manji sebagai seorang lesbian, argumentasinya terkait rekonsiliasi antara orientasi seksual dan keimanan, serta dukungannya terhadap legalisasi perkawinan sejenis dalam konteks hukum Kanada dan kerangka hak asasi manusia.

BAB III membahas tentang Landasan Teori dalam Telaah Pemikiran tentang Perkawinan Sejenis. Adapun yang akan dibahas meliputi teori tentang Perkawinan dalam perspektif Islam, teori Epistemologi Hukum Islam, dan teori mengenai Maqashid Asy-Syariah.

BAB VI merupakan pembahasan tentang Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis. Bab ini akan membahas tentang

bagaimana pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis dianalisis dari perspektif epistemologi hukum Islam dan maqashid asy-syariah.

BAB IV merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.